



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I N S P E K T O R A T**

JL. SOEKARNO HATTA, TELP :(0474) 321455, FAX : (0474) 321455, Email : inspektoratlutim@gmail.com
MALILI, 92981

**LAPORAN HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 700.1.2.1/417/IX/ITKAB

Tanggal : 29 September 2025

**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025 - 2029**

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Kabupaten Kota sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Reviu dilakukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistematika penyusunan tabel pada bab IV renstra PD tidak sama dengan tabel pada Inmendagri no 2 tahun 2025;
- b. Keterhubungan antara Kinerja, Indikator dan Target Kinerja **Telah Selaras** dalam Rancangan Akhir Renstra PD 2025-2029;
- c. Keterhubungan antara Kinerja, Indikator dan Target Kinerja **Telah Selaras**

- dalam Rancangan Akhir Renstra PD 2025-2029;
- d. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra PD **Telah Selaras**;
 - e. Program dalam RPJMD PD **Telah Sesuai** dengan program dalam Renstra PD;
 - f. Kesesuaian antara Target Kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 **Tidak Dapat Diselaraskan** dengan dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renstra PD Periode 2021-2025 karena indikator kinerja utama PD yang disajikan dalam dokumen pengendalian dan evaluasi hasil periode sebelumnya berbeda dengan IKU PD pada Renstra 2025-2029;
 - g. Tidak terdapat baseline, target 2024 pada dokumen pengendalian evaluasi hasil RPJMD 2021-2025;
 - h. Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) **Telah Sesuai** hingga level sub kegiatan.

II. Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN);
- 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 tentang Reviu Rancangan Akhir Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024 - 2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2024 – 2029 Lembaran Daerah tahun 2025 nomor 1 dan Tambahan lembaran daerah nomor 341;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 Lembar Daerah Nomor 4, tambahan lembaran Daerah Nomor 168 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur RPJMD 2025-2029;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1);
17. Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.7.2/556/Bapperida tanggal 11 September 2025 perihal Permintaan Reviu APIP RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur No. 800.1.1.1/361/IX/ITKAB tanggal 16 September 2025 perihal melakukan reviu Renstra TA. 2025-2029 pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Wotu, Kecamatan Kalaena, dan Kecamatan Towuti.

III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu :

1. Menilai kinerja
Mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Memastikan kualitas perencanaan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi terkini dan tugas perangkat daerah;
3. Menjamin relevansi
Memastikan kesesuaian program dengan tujuan dan sasaran strategis daerah termasuk integritas dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
4. Dasar perbaikan
Memberikan landasan bagi satuan kerja untuk menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya serta merevisi

Renstra jika diperlukan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Renstra adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Penelaahan dokumen dengan menggunakan data dan analisis pencapaian program kerja perangkat daerah untuk mengidentifikasi faktor mendukung dan penghambat;
- b. Penyelarasan dokumen dengan melakukan peninjauan kembali Renstra dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJPD dan RPJMD
- c. Wawancara dan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mengkomunikasikan hasil analisis menyelaraskan, mengkalifikasi isi strategis, dan menyebarkan informasi terkait Renstra.
- d. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu atas pelaporan hasil reviu yang telah dilakukan.

VI. Gambaran Umum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. **Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008** tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini yang secara langsung membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 25 Agustus 2008.

Terkait pedoman operasional yang lebih rinci bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merujuk pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan karsipan, termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan

program dan evaluasi.

Adapun Fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Timur yakni:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pencegahan;
2. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kepustakaan serta karsipan, termasuk koleksi perpustakaan dan arsip;
3. Menyediakan dan menyajikan informasi melalui pengelolaan koleksi perpustakaan yang relevan dan akses ke berbagai sumber informasi
4. Membina dan membudayakan gemar membaca dan budaya tulis di masyarakat melalui berbagai layanan perpustakaan;
5. Mengelola arsip dinamis dan statis, melakukan preservasi arsip, serta melakukan pembinaan karsipan sesuai undang-undang;
6. Menyelenggarakan layanan perpustakaan, layanan sirkulasi, informasi, referensi, termasuk perpustakaan keliling dan untuk pemustaka berkebutuhan khusus;
7. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang perpustakaan dan karsipan;
8. Menginisiasi dan mengembangkan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan pihak ketiga lainnya di bidang perpustakaan dan karsipan.

VII. Uraian Hasil Reviu

- a. Sistematika penyusunan tabel pada bab IV renstra PD tidak sama dengan tabel pada inmendagri no 2 tahun 2025;
- b. Indikator kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Kabupaten/Kota sama dengan indikator sub kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
- c. Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)
Penurunan target 2026-2030 dan target 2025 tidak ada;

- d. Indikator jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)
Penurunan target 2026-2030 dari baseline 2024 dan target 2025 tidak ada sedangkan pagu bertambah;
- e. Indikator Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)
Penurunan target 2026-2030 lebih rendah dari baseline dan target 2025 tidak ada;
- f. Terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator yang tidak mencantumkan target :
- 1) Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%);
 - 2) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen);
 - 3) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen);
 - 4) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen);
 - 5) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan);
 - 6) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan);
 - 7) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan);
 - 8) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan);
 - 9) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang);
 - 10) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket);
 - 11) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket);
 - 12) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

(Paket);

- 13) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen);
- 14) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan);
- 15) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan);
- 16) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit);
- 17) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit);
- 18) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan);
- 19) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan);
- 20) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan);
- 21) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit);
- 22) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit);
- 23) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit);
- 24) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)
- 25) Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen);
- 26) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang);
- 27) Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus);
- 28) Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase);
- 29) Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga);
- 30) Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan

- Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan);
- 31) Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase);
 - 32) Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)
- g. Indikator Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas) target 2025 tidak ada dan target menurun dari baseline 2024;
- h. Tidak mencantumkan target 2025 dan target stagnan pada indikator :
- 1) Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan);
 - 2) Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan);
 - 3) Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan).
- i. Terdapat target menurun dari baseline 2024 sedangkan pagu tetap pada indikator :
- 1) Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip);
 - 2) Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip).
- j. tidak ada baseline (apakah IKU baru atau tidak) pada indikator :
- 1) Tingkat Kunjungan Masyarakatke Perpustakaan(%);
 - 2) Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik(%).
- k. Tidak memiliki baseline 2024 pada indikator :
- 1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket);
 - 2) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit);
 - 3) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang Disediakan (Unit);

- 4) Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang);
- 5) Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan);
- 6) Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)

I. Tidak memiliki baseline 2024 target berfluktuasi sedangkan pagu tetap pada indikator :

- 1) Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiaran oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar);
- 2) Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiaran oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar).

m. Tidak mencantumkan target pada indikator :

- 1) Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
- 2) Persentase realisasi anggaran;
- 3) Persentase aset teradministrasi;
- 4) Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar;
- 5) Persentase layanan administrasi tepat waktu;
- 6) Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan;
- 7) Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan;
- 8) Persentase barang dipelihara secara berkala;
- 9) Persentase peningkatan pemustaka;
- 10) Persentase pembudayaan gemar membaca;
- 11) Persentase pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah dan desa;
- 12) Persentase arsip statis yang dikelola;
- 13) Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi

- kearsipan;
- 14) Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan;
 - 15) Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup.
- n. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Telah Selaras;
 - o. konsistensi dan keterhubungan antara program dalam RENSTRA dengan program di RPJMD telah sesuai;
 - p. kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir renstra dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya telah selaras akan tetapi tidak memiliki baseline 2020 dan baseline yang terdapat di renstra tidak sesuai dengan realisasi dalam dokumen pengendalian periode sebelumnya;
 - q. Indikator yang terdapat pada RENSTRA PD 2025-2029 tidak sama dengan indikator pada dokumen pengendalian;
 - r. Tidak terdapat baseline target 2024 pada dokumen pengendalian evaluasi hasil RPJMD 2021-2025;
 - s. Target kinerja IKK tidak dapat di selaraskan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya (berbeda), karena sudah menggunakan indikator dari permendagri no 18 tahun 2020;
 - t. Indikator pada dokumen pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD 2021-2025 tidak sama dengan indikator pada RENSTRA 2025-2029 karena sudah menggunakan indikator dari permendagri no 18 tahun 2020;
 - u. Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan data statistik Sektoral Daerah (**DSSD**) **Telah Sesuai**;
 - v. tidak ada uraian permasalahan dan isu strategis pada bab II Renstra.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama kepada seluruh pejabat dan pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atas kesediaannya memberikan

data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2025-2029.



CATATAN HASIL REVIU DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT**

Jl. Soekarno - Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Maili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Email : inspektoratltim07@gmail.com

Disusun Oleh / Tanggal	: Alviani, ST / 29 September 2025
Direviu Oleh / Tanggal	: Rina, SP. MP / 29 September 2025
Disetujui oleh / Tanggal	: ST. Masniah Absar, STP/29 Sept 2025

REVIU

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 - 2029

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Uraian Catatan Hasil Reviu

1	Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	
No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan PD tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan dan sasaran kinerja urusan dalam rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029	merevisi kembali tabel 4.3 dengan menyusun program-kegiatan-sub kegiatan secara berjenjang
2	sistematika penyusunan tabel pada bab IV renstra PD tidak sama dengan tabel pada in mendagri no 2 tahun 2025	sesuaikan sistematika penyusunan tabel (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) pada RENSTRA PD dengan tabel (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) pada INMENDAGRI
3	indikator kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Kabupaten/Kota sama dengan indikator sub kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	merumuskan kembali indikator kegiatan

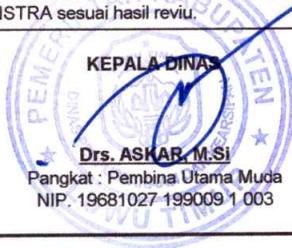
2 Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) penurunan target 2026-2030 dan target 2025 tidak ada	Mencantumkan target 2025 dan meninjau ulang target 2026-2030
2	Indikator jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip) penurunan target 2026-2030 dari baseline 2024 dan target 2025 tidak ada sedangkan pagu bertambah	Mencantumkan target 2025 dan meninjau ulang target 2026-2030
3	Indikator Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) penurunan target 2026-2030 lebih rendah dari baseline dan target 2025 tidak ada	Mencantumkan target 2025 dan meninjau ulang target 2026-2030
4	Target 2025 tidak ada tercantum pada Indikator :	Mencantumkan target 2025 pada indikator
	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (Laporan)
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)

	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Percentase)	Tingkat Ketersediaan Arsip (Percentase)
	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Percentase)	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Percentase)
	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Percentase)	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Percentase)
5	Indikator Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas) target 2025 tidak ada dan target menurun dari baseline 2024	Mencantumkan target 2025 dan meninjau ulang target 2026-2030
6	target 2025 tidak ada dan target stagnan pada indikator	Mencantumkan target 2025 dan meninjau ulang target yang dicantumkan pada indikator
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)
	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)
7	target menurun dari baseline 2024 sedangkan pagu tetap pada indikator :	Meninjau ulang target pada indikator
	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)
8	tidak ada baseline (apakah IKU baru atau tidak) pada indikator :	Mencantumkan base line pada indikator
	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan(%)	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan(%)
	Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik(%)	Persentase Arsip Statis yang Terorganisir dengan Baik(%)
9	tidak memiliki baseline 2024 pada indikator :	Mencantumkan base line 2024 pada indikator
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)
	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Percentase)	Mencantumkan base line 2024 dan meninjau ulang target
10	tidak memiliki baseline 2024 target berfluktiasi sedangkan pagu tetap pada indikator :	tidak memiliki baseline 2024 target berfluktiasi sedangkan pagu tetap pada indikator :
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiaran oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiaran oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiaran oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiaran oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)
11	tidak mencantumkan target pada indikator :	Mencantumkan target pada indikator
	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi anggaran
	Persentase aset teradministrasi	Persentase aset teradministrasi
	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar
	Persentase layanan administrasi tepat waktu	Persentase layanan administrasi tepat waktu
	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan
	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan
	Persentase barang dipelihara secara berkala	Persentase barang dipelihara secara berkala
	Persentase peningkatan pemustaka	Persentase peningkatan pemustaka
	Persentase pembudayaan gemar membaca	Persentase pembudayaan gemar membaca
	Persentase pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah dan desa	Persentase pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah dan desa
	Persentase arsip statis yang dikelola	Persentase arsip statis yang dikelola
	Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi karsipan	Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi karsipan
	Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan	Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan
	Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup
3	Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.	
	a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.	
No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Telah Selaras	
	b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.	

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	konsistensi dan keterhubungan antara program dalam RENSTRA dengan program di RPJMD telah sesuai	

4	Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024.	
a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.		
No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir renstra dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya telah selaras akan tetapi tidak memiliki baseline 2020 dan baseline yang terdapat di renstra tidak sesuai dengan realisasi dalam dokumen pengendalian periode sebelumnya	tentukan baseline 2024 dan sesuaikan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya
2	kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir renstra dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya telah selaras akan tetapi tidak memiliki baseline 2020 dan baseline yang terdapat di renstra tidak sesuai dengan realisasi dalam dokumen pengendalian periode sebelumnya	tentukan baseline 2024 dan sesuaikan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya
3	indikator yang terdapat pada RENSTRA PD 2025-2029 tidak sama dengan indikator pada dokumen pengendalian	
b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.		
No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	tidak terdapat baseline target 2024 pada dokumen pengendalian evaluasi hasil RPJMD 2021-2025	
2	tidak terdapat baseline, target 2024 pada dokumen pengendalian evaluasi hasil RPJMD 2021-2026	
3	target kinerja IKK tidak dapat di selaraskan dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya (berbeda), karena sudah menggunakan indikator dari permendagri no 18 tahun 2020	
4	indikator pada dokumen pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD 2021-2025 tidak sama dengan indikator pada RENSTRA 2025-2029 karena sudah menggunakan indikator dari permendagri no 18 tahun 2020	
5	Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah).	
No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	DSSD telah sesuai pada level indikator sub kegiatan	
Catatan Tambahan		
No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	tidak ada uraian permasalahan dan isu strategis	mencantumkan uraian permasalahan dan isu strategis pada Bab II Renstra 2025-2029
Tanggapan atas Rekomendasi :		
1	Akan dilakukan perbaikan penginputan pada aplikasi SIPD;	
2	Target 2025 pada aplikasi SIPD tidak tersedia sehingga harus manual menambah kolom target 2025. Dan untuk target indikator hasil download dari aplikasi tidak sesuai penempatannya sehingga harus diperbaiki secara manual;	
3	Untuk persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki merupakan program/kegiatan/sub kegiatan baru sehingga tidak ada baseline 2024	
4	Untuk IKU merupakan indikator baru;	
5	Untuk point 9, tidak memiliki baseline 2024 karena tidak ada dalam dokumen penganggaran;	
6	Akan merevisi dokumen RENSTRA sesuai hasil reviu.	



Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199009 1 003

PENGENDALI TEKNIS

ST. MASNIAH ABSAR, S.TP
NIP. 19721124 200502 2 002